RIAU JOURNAL OF EMPOWERMENT
raje.unri.ac.id

Strategi Pemberdayaan dan Penguatan Modal Sosial Masyarakat di Era Pandemi Covid-19

Neka Fitriyah*[1], & Apriliyanti Pratiwi[2]

[1] Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
[2] Fikom Universitas Pancasila, Indonesia
* neka_fitriyah@untirta.ac.id

Abstrak Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai persoalan sosial, ekonomi yang dampaknya dirasakan ekstrem oleh masyarakat. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi agar masyarakat lemah dapat memiliki keberdayaan dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ekonomi dan politik yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 secara mandiri. Eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan kajian pustaka merupakan strategi dan teknik dalam mengkonstruksi strategi pemberdayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan harus berbasis pada kekuatan potensi budaya, nilai-nilai, dan kearifan lokal masyarakat. Modal sosial menjadi energi dalam meningkatkan keberdayaan dan kapasitas masyarakat. Adapun tahapan dalam strategi pemberdayaan yang harus dilakukan adalah seleksi lokasi, sosialisasi dan kegiatan pemberdayaan. Bentuk pemberdayaan yang tepat di era pandemi Covid-19 adalah Community Based Empowerment, sedangkan modal sosial dapat dirancang dalam penguatan modal sosial masyarakat di era pandemi Covid-19 yakni (1) Social bounding (2) Social bridging (3) Social linking. Konstruksi strategi pemberdayaan masyarakat terletak pada diposisikannya kearifan lokal, potensi-potensi lokal, karakteristik individu dan karakeristik wilayah sebagai energi dalam proses pemberdayaan. Adapun rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah diperlukannya konsep pemberdayaan dan penguatan kapasitas modal sosial yang implementatif, terukur dan mengarah pada peningkatan kreatifitas dan inovasi masyarakat.

Abstract The Covid-19 pandemic has caused various social and economic problems, the impact of which is felt by the community to be extreme. The Covid-19 pandemic has caused various social and economic problems, the impact of which is felt by the community to be extreme. People who are economically weak, have acces and education in a pandemic situation are faced with groups of people we have dominat power, and have implications for unbalanced competition in socio economis life. Empowerment is one of the strategies so thet weak communities can have empowerment and are to solve problems caused by the Covid-19 pandemic voluntarily and independently.Exsploration of previous studies and literature review are strategies and techniques in constructing empowerment strategies. The results of this study indicate that empowerment must be based on the potential strength of culture, values, and local wisdom of the community. Social capital becomes energy in increasing community empowerment and capacity. The stages in the empowerment strategy that must be carried out are site selection, socialization and empowerment. The right form of empowerment in the Covid-19 pandemic era is Community Based Empowerment, while social capital can be designed to strengthen community social capital in the Covid-19 pandemic era, namely (1) Social bounding (2) Social bridging (3) Social linking. The construction of community empowerment strategies lies in the positioning of local wisdom, local potentials, individual characteristics and regional characteristics as energy in the empowerment process. The recommendations produced in this study are the need for the concept of empowerment and strengthening of social capital capacity that is implementable, measurable and leads to increased creativity and innovation of the community.

Keywords: society; empowerment; strength; potential; social

OPEN ACCESS

Citation: Fitriyah, N., & Pratiwi, A. (2023). Strategi Pemberdayaan dan Penguatan Modal Sosial Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. Riau Journal of Empowerment, 6(3), 165-178. https://doi.org/10.31258/raje.6.3.165-178

Received: 2023-01-26 Revised: 2024-02-05 Accepted: 2024-02-05

Language: Bahasa Indonesia (id)

ISSN 2623-1549 (online), 2654-4520 (print)

© Neka Fitriyah, & Apriliyanti Pratiwi. Author(s) retains the copyright of article published in this journal, with first publication rights granted to Riau Journal of Empowerment. The article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PENDAHULUAN

Setiap negara tanpa terkecuali memiliki dan menghadapi persoalan serta tantangan besar dalam melaksanakan pembangunan, baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, teknologi maupun aspek sosial. Dalam waktu bersamaan, negara-negara ini pula diperhadapkan pada persoalan kemajuan teknologi dan industri yang makin melesat jauh bahkan tidak dapat terbendung. Negara-negara di dunia kemudian dipicu agar mampu bersaing dalam dunia global dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), produktivitas sumber daya alam (SDA) ketersediaan teknologi, industri dan optimalisasi modal sosial. Akibatnya, pembangunan secara bersamaan memperhadapkan pemerintah pada berbagai persoalan kompleks. Salah satunya, pemerintah dituntut untuk berkomitmen agar tetap mengedepankan nilai-nilai humanis, rasa keadilan, keberimbangan alam, menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM) dan pola keberlanjutan dalam pembangunan. Situasi ini praktis memperhadapkan negara-negara pada situasi rumit, yang mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan penting secara cepat dan tepat. Problematika pembangunan ini kemudian dipertajam dengan pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada munculnya persoalan-persoalan mendasar baru di berbagai negara.

Sejumlah pakar dengan berbagai disiplin ilmu memikirkan dampak Covid-19 yang bahkan lebih buruk dari kondisi *Great Depression* pada tahun 1920-1930. Bank Indonesia (BI) dan menteri keuangan RI turut berpandangan tentang kesuraman masa depan ekonomi, yang menyatakan bahwa setidaknya sampai awal tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tertekan sampai minus 6,13% (*Fiscal Monitor, April 2020 Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic.*, 2020) Pandemi berdampak luar biasa bagi perekonomian dan kondisi masyarakat dunia. Singapura, Korea Selatan, Jepang dan AS, Selandia Baru, Inggris dan Prancis-pun sudah merasakannya (Junaedi & Salistia, 2020a). Arab Saudi (Sikki, 2020) pasar keuangan global (Zhang et al., 2020) termasuk pasar modal Indonesia (Junaedi, D., & Salistia, 2020) mengalami dampak yang tidak kalah serius. IMF bahkan memprediksi bahwa selama Covid-19 negara-negara maju mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi antara -5,5% (Jerman), -15,4% (AS) dan rata-rata negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi minus 10,7% (Junaedi & Salistia, 2020b).

Lebih jauh, IMF kemudian juga memproyeksikan kerugian ekonomi global akibat Covid-19 yang dapat mencapai 12 trilliun dolar atau sekitar 174.000 triliun (kurs 14.500). Kristallina Giorgieva, direktur pelaksana IMF memprediksi bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan ekonomi global hingga nyaris berujung krisis. Pandemi Covid-19 pada akhirnya menyebabkan hampir 95% negara-negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi ke arah negatif. (*Fiscal Monitor, April 2020 Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic.*, 2020) menganalisis bahwa pada tahun 2020-2021 perekonomian negara berkembang terkecuali China, diprediksi akan mengalami fluktuasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tajam dibandingkan dengan negara-negara maju. Pandemi Covid-19 bahkan telah menyebabkan kepanikan sosial masyarakat di berbagai negara (Purba, 2020).

Pandemi Covid-19 kemudian menjadi isu sentral dalam berbagai program pembangunan di dunia termasuk di Indonesia. Perencanaan jangka menengah Indonesia mengalami berbagai penyesuaian dan pergeseran di tahun 2020 guna mengatasi persoalan pandemi Covid-19. (Nasution et al., 2020) menjelaskan bahwa awal periode RPJMN, program pembangunan dipusatkan pada pola-pola penanganan dan penanggulangan Covid-19. Begitu juga APBN 2020 difokuskan untuk mitigasi bencana pandemi Covid-19. Tujuannya adalah agar dampak

ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya dapat diminimalkan sehingga tidak terjadi guncangan sosial. Konsekuensinya, pandemi Covid-19 telah banyak mengubah rencana dan strategi pembangunan nasional yang telah dirancang.

Berbagai kebijakan pembangunan dirancang menjadi strategi terpadu Indonesia dalam percepatan pembangunan di masa pandemi. (Muhyiddin, 2020) memaparkan bahwa dalam hal percepatan pembangunan daerah, pemerintah Indonesia memiliki tiga koridor. Pertama, koridor pertumbuhan. Koridor ini diproyeksikan agar dalam era pandemi Covid-19 ini negara tetap dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat. Kedua koridor pemerataan. Koridor ini diperuntukkan agar mampu mengembangkan wilayah untuk memicu kemerataan pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Ketiga, pembangunan desa terpadu. Menciptakan pasar-pasar lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, optimalisasi produksi dan ketersediaan pangan di desa. Pembangunan desa terpadu merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan desa, pengurangan kesenjangan, menjamin kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, sekuat apapun pemerintah melaksanakan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat, pembangunan masih banyak menyisakan persoalan. Diantaranya, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, partisipasi masyarakat yang rendah dan persoalan sosial lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan angka penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 sebanyak 27,8 juta orang, sedang tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 mencapai 6,26 persen. Namun demikian lapangan pekerjaan mengalami peningkatan 0,34 persen pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Data ini memperjelas bahwa persoalan-persoalan kemiskinan dan pengangguran menambah berat pekerjaan pemerintah di era pandemi Covid-19. Banyak program-program pembangunan yang kemudian dikonsentrasikan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Perlu diketahui bahwa pada pertengahan era 1990-an Indonesia pernah menjadi salah satu contoh pembangunan yang berhasil, sebelum kemudian dilanda krisis moneter pada tahun 1997-1998. Keberhasilan masa lalu ini memberikan *signal* bahwa Indonesia di era pandemi Covid-19 akan mampu bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi. Pandemi semakin mengantarkan masyarakat Indonesia pada dunia global, dimana keberdayaan dan kemandirian masyarakat menjadi solusi kebangkitan negara. (Fathy, 2019)) konsep pemberdayaan dan konsep modal sosial perlu difungsikan sebagai kerangka berpikir dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. (Syahra, 2003) menggambarkan bahwa ketika pemberdayaan dan modal sosial disinergikan, maka akan berdampak pada terciptanya komunitas-komunitas masyarakat mandiri. Kesetaraan, kesempatan, penghargaan dan akses adalah diantara sekian hal yang harus tersedia dalam proses pemberdayaan.

Diantara kesibukan pemerintah dan seluruh *stakeholders*, pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru bagi penguatan keberdayaan masyarakat. Program pemerintah dituntut untuk lebih memfokuskan pada pemberdayaan kapasitas masyarakat, dan masyarakat dituntut *adaptable* terhadap perubahan zaman. Pengetahuan, *skill*, akses, peluang dan pasar adalah infrastruktur yang harus tersedia dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat kemudian diyakini sebagai solusi dalam mengatasi persoalan pembangunan bangsa terkhusus pada persoalan sosial di era pandemi Covid-19. Pertanyaannya, sejauh manakah keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan dan sejauh manakah kesanggupan serta stamina

masyarakat untuk dapat berdaya, apasajakah yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat agar tetap berdaya dan mampu merespon perubahan di era pandemi Covid-19.

Dari persoalan-persoalan di atas, maka diperlukan strategi pemberdayaan agar masyarakat lebih berdaya, mampu berkompetisi dan mampu memanfaatkan berbagai situasi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 secara mandiri. Tulisan ini, bertujuan untuk mengkonstruksi strategi pemberdayaan yang mampu mengoptimalkan modal sosial masyarakat dan mudah diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah terkhusus di masa pandemi Covid-19. Konstruksi yang sifatnya universal dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek adalah konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini. Eksplorasi terhadap model-model strategi pemberdayaan terdahulu dan pendekatan analisis kepustakaan merupakan metode serta teknik dalam mengkonstruksi strategi pemberdayaan yang dimaksud.

METODE PENERAPAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* terhadap hasil-hasil penelitian terbaru terkait pemberdayaan sosial, modal sosial masyarakat dan penelitian-penelitian yang mengkaji tentang problematika sosial ekonomi dan politik di era pandemi Covid-19. *Review* dilakukan atas 20 jurnal yang diterbitkan antara tahun 2008-2021 dengan didukung berapa literatur buku yang menjadi dasar konsep pemberdayaan sosial masyarakat. Teknik *review* dilakukan dengan cara mengelompokkan artikel-artikel ilmiah dalam tiga kategori yakni konsep (1) Pemberdayaan (2) Modal sosial (3) Problematika sosial ekonomi di era pandemi Covid-19. Dari pengkategorian tersebut, kemudian dimunculkan kluster-kluster topik yang menjadi temuan-temuan dasar penelitian yang diabstraksikan dalam poin-poin pembahasan.

Relasi teoritik pemberdayaan sosial dan modal sosial masyarakat merupakan pembahasan yang mengungkap hubungan resiprokal dari dua konsepsi yang kemudian dapat ditarik benang merahnya dalam mempraktikan strategi pemberdayaan. Penguatan modal sosial dan pemberdayaan sebagai sebuah solusi mencakup konsepsi-konsepsi modal sosial yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Adapun strategi pemberdayaan merupakan konstruksi dari keseluruhan konsep pemberdayaan dan modal sosial sebagai solusi memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Relasi Teoritik Pemberdayaan dan Modal Sosial Masyarakat

Ada dua hal penting dalam mengkonstruksi strategi pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat dalam menghadapi persoalan pembangunan di era pandemi Covid-19. Pertama, penting memetakan relasi dan korelasi teoritik maupun konseptual antara konsep pemberdayaan dan modal sosial masyarakat. Kedua, merujuk pada realitas keberagaman yang dimiliki Indonesia, maka pemberdayaan harus memposisikan potensi keberagaman sebagai energi dalam mensejahterakan masyarakat. Dua hal ini merupakan persoalan esensial sehingga implementasi pemberdayaan dalam konteks ke Indonesiaan memiliki kekhasan kuat dan bersifat universal. Secara praktis, potensi modal sosial masyarakat yang heterogen memudahkan Indonesia menampilkan nilai-nilai dan kearifan lokal sebagai keunikan dalam merancang model pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah dengan menentukan konsep, mencari keterkaitan potensi dari nilai-nilai lokal

tersebut dalam pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat. Kemudian mengidentifikasi problematika ekonomi sosial yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, hingga rancangan pemberdayaan yang dhasilkan mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan sendiri muncul dan berkembang di Eropa pada abad pertengahan dan kemudian terus berkembang hingga era 90-an. Konsep pemberdayaan telah banyak mengalami perubahan, bahkan (Widayanti, 2012) menjelaskan bahwa istilah pemberdayaan muncul hampir bersamaan dengan kemunculan aliran *Eksistensialisme, Phenomenologi, Neomarxisme, Fruedisme* hingga kemudian pada pertengahan abad 20 pemberdayaan diposisikan sebagai aliran baru yakni aliran *Post-Modernisme*. Pemberdayaan dalam kontes *Post-Modernisme* menyatakan bahwa masyarakat tidak lagi diatur oleh mekanisme produksi melainkan oleh reproduksi informasi, dimana masyarakat dan media saling memproduksi makna. Dalam konsepsi ini, masyarakat menjadi faktor yang menentukan terbentuknya konsensus dalam pembangunan, dan keberdayaan masyarakat menjadi kunci utama.

Ife dalam bukunya yang berjudul *Community Develepment, Greating Community Alternatives* tahun 1997 menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan, berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya. (Widjajanti, 2011) menyatakan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya merupakan upaya mempersiapkan masyarakat agar mampu dan secara suka rela aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup. Definisi ini sebenarnya memetakan bahwa pemberdayaan memiliki dua substansi yakni *to give authority to* (upaya memberikan kekuasaan, memindahkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas) dan *to give ability to or enable* (upaya memberi keberdayaan). Dua konsepsi ini dipandang sebagai upaya pemberdayaan dalam memberikan kemandirian, otoritas dan kepercayaan kepada masyarakat agar memiliki kreatifitas dalam meningkatkan kualitas hidup. (A. P. Hadi, 2015) menjelaskan bahwa pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan kapasitas individu dan anggota masyarakat, tetapi juga terkait dengan penguatan pranata-pranata sosial.

Dengan demikian, pemberdayaan mengarah pada proses menanamkan nilai dan pemikiran visioner seperti masa depan yang lebih baik, inovasi, keterbukaan dan kebertanggung jawaban. Konsep ini kemudian mengarahkan sifat pembangunan pada *People Centred Participatory, Empowering and Sustainable* (Servaes & Tamayo, 2017). Basis pembangunan partisipatori adalah penekanannya pada warga (*people*), keaslian visi pembangunan (*the endogenos vision of developement*) dan perhatian terhadap isu kekuasaan yang bercirikan dialog dan komunikasi horizontal. Dalam kaitannya dengan pembangunan partisipatori, pemberdayaan kemudian mendesak konsep pembangunan yang perlu merepresentasikan nilai-nilai, tata sosial dan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

(Cahyono & Adhiatma, 2016) menggambarkan ragam cara dalam memperkuat modal sosial masyarakat, diantaranya dengan memberikan pembinaan, pemberdayaan dan penguatan kapasitas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini dipertegas oleh (Arumsari et al., 2017) yang menjelaskan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) membutuhkan partisipasi sadar dan aktif masyarakat secara sukarela dalam pembangunan dengan basis pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat. (Shaleh, 2020) modal sosial diposisikan sebagai kerangka teoritik dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat akan mampu berpartisipasi dalam pembangunan dengan potensi modal sosial yang dimiliki.

Dalam praktiknya, modal sosial diimplementasikan dalam bentuk kerjasama dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan dalam pembangunan (Mudiarta, 2017) memperhitungkan bahwa modal sosial akan memiliki nilai jika mampu membantu masyarakat untuk memperluas akses sumber-sumber ekonomi masyarakat. Misalnya, masyarakat menjadi mudah mendapatkan informasi, memperoleh pekerjaan, memulai usaha, dan menekan biaya transaksi. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan modal sosial. Diantaranya kebiasaan, kedudukan (peran aktor), pendidikan, kelas sosial ekonomi serta nilai-nilai personal. Pada gilirannya, modal sosial berkontribusi pada banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan kegiatan peningkatan akses informasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang bersifat inklusif. Dengan kata lain bentuk pemberdayaan yang dianggap solutif dalam merespon problematika sosial yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 adalah bentuk pemberdayaan berbasis CBE (*Community Based Empowerment)*.

Secara konseptual pemberdayaan berbasis CBE, menggiring aktivitas masyarakat untuk lebih produktif melalui ikatan sosial dan kedekatan masyarakat. Kedekatan fisik, psikologi, ras, suku dan agama. Pendekatan CBE ini kemudian menuntut pemerintah untuk mampu menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk dijadikan modal dasar dalam menyusun strategi pembangunan (Wirutomo, 2011). Catatan penting dalam konsep pemberdayaan CBE ini adalah upayanya memberikan alternatif atas keliru dan gagalnya konsep pembangunan yang diterapkan selama ini. Bagi CBE, pembangunan tidak harus dan tidak tepat lagi jika diartikan sekedar proses pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas dan industrialisasi. Konsepsi pembangunan di era pandemi Covid-19 ini, perlu diletakkan sebagai proses penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarkat. Dengan kata lain, harus ditumbuhkan kepercayaan bahwa masyarakat memiliki kekuatan dan kemampuan berpartisipasi melalui kerjasama dan sinergitas dengan seluruh *stakeholders*. Pandemi Covid-19 kemudian memposisikan modal sosial dan pemberdayaan sebagai dua konsepsi teoritik dan praksis yang saling berhubungan.

Penguatan Modal Sosial dan Pemberdayaan sebagai Sebuah Solusi

Sektor yang paling berdampak pada kehidupan masyarakat di era pandemi Covid-19 ini adalah sektor sosial dan ekonomi. Masyarakat tidak hanya dibatasi kegiatannya, tetapi interaksi sosial juga dibatasi hingga membentuk tatanan sosial baru. Dalam tatanan nilai sosial, tidak sedikit masyarakat yang belum dapat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru di era pandemi Covid-19. Dalam persoalan hubungan ketenagakerjaan, banyak masyarakat terkena PHK dan berdampak pada perekonomian keluarga. Banyak masyarakat yang kemudian beralih profesi bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu seperti berdagang dan menjadi buruh harian.

Terobosan dalam menghadapi polemik pembangunan di era pandemi Covid-19 terletak pada konsepsi pembangunan itu sendiri. Konsepsi pembangunan dalam era ini hendaknya mengedepankan aspek manusia sebagai subjek pembangunan (*Community Based Development*). Pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat menjadi solusi atas cacatan hitam dampak pandemi Covid-19. Pembangunan bertajuk pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat ditujukan untuk mengurangi masalah masalah sosial ekonomi, persoalan struktural dan kultural masyarakat. Pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi kekuatan (*power*) kepada orang yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan (*powerless*), dari posisinya yang semula sebagai

objek dapat menjadi subjek yang sepenuhnya sadar dan paham serta mampu mengatasi persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh Covid-19.

Pemberdayaan dalam praktiknya akan sangat bergantung pada kapasitas modal sosial masyarakat. Begitu pula sebaliknya, peningkatan modal sosial masyarakat akan sangat ditentukan oleh pola dan strategi pemberdayaan yang diterapkan. Kekuatan modal sosial pada persoalan pandemi Covid-19 akan menunjukkan sifat produktif, relasi kuat masyarakat, konsistensi yang merepresentasikan kekuatan jaringan, norma dan kepercayaan dalam mendorong produktifitas masyarakat. Kekuatan modal sosial inilah yang kemudian diproyeksikan akan mampu menjadi solusi atas persoalan sosial ekonomi yang menghimpit masyarakat. Pertama produktifitas, dapat dilihat dengan keharusan masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas secepat mungkin dengan kondisi yang tidak menentu. Misalnya dengan pemanfaatan dan optimalisasi teknologi digital dalam mengembangkan usaha dan atau memberikan pelayanan. Kedua konsistensi, masyarakat dituntut untuk memiliki pilihan yang tetap, mengikat dan ditekuni secara terus menerus. Misalnya konsisten menekuni satu bidang usaha hingga paham seluk beluk, persoalan dan proyeksinya kedepan dan yang lebih penting masyarakat memiliki solusi terukur ketika terjadi persoalan yang ditimbulkan.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa ketersediaan modal sosial yang lebih banyak, menjadikan masyarakat lebih cerdas, lebih cepat dalam merespon serta memanfaatkan peluang-peluang. Merujuk (Rizki Rahmawati, 2017) ada tiga parameter dalam mengimplementasikan konsep modal sosial yakni: (1) Kepercayaan (2) Norma (3) Jaringan. Pertama kepercayaan. (Fukuyama & Khan, 2012) kepercayaan merupakan harapan masyarakat terhadap satu isu yang ditunjukkan dengan perilaku jujur, teratur dan kerjasama sesuai norma-norma yang dianut. Lebih lanjut (Cox, 1995) berpandangan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, maka aturan-aturan sosial cenderung dinilai positif dan hubungan-hubungan yang ada dimaknai sebagai bentuk kerjasama.

Kedua norma. Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan atau kontrol terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam skema pemberdayaan, norma diproyeksikan sebagai produk dari kepercayaan sosial yang tumbuh menjadi ikatan sosial bersama. Ketiga jaringan. Jaringan dimaksudkan sebagai relasi-relasi berjejaring yang memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi sosial. (S. Hadi, 2016) menggambarkan bahwa jejaring sosial yang kokoh, memperkuat kerjasama serta memberikan manfaat penguatan modal sosial bagi para anggotanya. Dari pada itu, pemberdayaan dan penguatan modal sosial merupakan solusi atas berbagai persoalan pembangunan terkhusus persoalan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Selaras dengan hal tersebut (Woolcock, 2001) menyampaikan tiga tipe modal sosial yang perlu diperkuat sebagai basis penguatan masyarakat: (1) *Social bounding;* (2) *Social bridging;* (3) *Social linking*. Tipe-tipe modal sosial dapat dikembangkan sebagai upaya memberikan penguatan masyarakat di era pandemi Covid-19. Pertama, *social bounding* yang menitik beratkan pada ikatan kuat pada sistem kemasyarakatan. Ikatan antar individu yang mengalami PHK misalnya, sesama pelaku UMKM, sesama pengelola pariwisata, sahabat, tetangga dan keluarga yang merasakan dampak dan situasi yang sama. *Social bounding* menjadi perekat masyarakat dalam merespon persoalan-persoalan yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Kedua *social bridging*. Tipe ini mepresentasikan kekuatan ikatan sosial yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Ikatan sosial muncul karena adanya berbagai kelemahan yang dimiliki masyarakat sehingga diperlukan sikap saling mendukung, membantu dan bekerjasama dalam mengatasi kelemahan yang ada. Bentuk modal sosial ini dapat dilihat pada

kerjasama produsen dengan pemasok bahan mentah dengan konsumen. Kerjasama pengusaha dengan dinas terkait atau perbankan, kerjasama masyarakat membangun UMKM desa, koperasi dll adalah contoh-contohnya. Ikatan sosial bertujuan agar pihak-pihak yang terkait dapat saling mengoptimalkan potensi dan merubah kelemahan menjadi kekuatan atau peluang. Ketiga *social linking*. Tipe ini merupakan tipe yang paling menjangkau masyarakat dan memahami bahwa masyarakat memiliki latar belakang, potensi dan karakteristik berbeda. Perbedaan ini kemudian membuat masyarakat membutuhkan kelompok lainnya dan berhimpun dalam organisasi-organisasi untuk memperkuat kapasitas yang dimiliki. Contoh pelaku usaha tergabung dengan perhimpunan dan organisasi-organisasi untuk memperoleh akses pengembangan usaha maupun peningkatan pelayanan. Di era pandemi Covid-19 ini, *social linking* dapat terlihat ketika UMKM membentuk perhimpunan-perhimpunan sebagai sarana memperkuat jaringan, akses dalam mengembangkan usaha.

Tipe-tipe modal sosial diatas merupakan potensi-potensi masyarakat yang perlu digali dan dioptimalkan. *Social bounding* di era pandemi Covid-19 misalnya, ketika banyak kasus pendapatan masyarakat berkurang drastis akibat pandemi Covid-19, maka secara spontan masyarakat dituntut untuk meningkatkan kreatifitasnya agar dapat bertahan hidup. Membuat usaha bersama dengan sesama karyawann yang terkena PHK, membuat produk-produk baru bagi UMKM, menyesuaikan pola penjualan sesama pelaku usaha, dan atau merintis usaha bersama keluarga. Kemudian setelah melakukan *social bounding* masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, kemudian secara bersama saling memberikan stimulus, dukungan dan bekerjasama agar upaya yang dilakukan dapat berkembang. Memberi ide tentang pemasaran digital, manajemen pengelolaan produk dan memberikan informasi akses permodalan inilah kemudian yang dinamakan *social bridging*. Kemudian ketika masyarakat bergabung pada perkumpulan dan perhimpunan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan kapasitasnya maka itulah yang dinamakan *social linking*.

Dari skema-skema pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat, langkah selanjutnya adalah tinggal bagaimana pemerintah selaku eksekutor pembangunan dapat membuat kebijakan dan program pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat. Program yang mendorong pada penguatan modal sosial masyarakat, kapasitas masyarakat sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dalam menghadapi era pandemi Covid-19. Pemerintah dengan kekuatan anggaran dan infrastruktur serta SDM nya dapat meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia mampu menghadapi dan bahkan bebas dari Covid-19. Pada aspek norma, pemerintah dapat merealisasikannya dengan membuat aturan, kebijakan, program serta nilai-nilai sosial yang diberlakukan kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat secara bersama bersinergi menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan yang berdampak pada perbaikan taraf hidup walaupun di era pandemi Covid-19. Sedangkan parameter jaringan adalah bagaimana pemerintah memberikan akses dan memfasilitasi masyarakat untuk membuat dan ada dalam lingkaran siklus jejaring sosial yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Lebih lanjut untuk tipe modal sosial, *social bonding* pemerintah dapat dengan mudah menginisiasi terciptanya ikatan-ikatan sosial yang kuat bagi masyarakat dan *stakeholders* sebagai rasa kebersamaan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan membantu berkembangannya usaha mikro masyarakat melalui kebijakan sistemik dengan lingkungan pasar yang kondusif. Pada persoalan s*ocial bridging*, pemerintah dapat mitra dan menghubungkan berbagai pihak terkait untuk secara bersama-sama membuat skema sistemik dalam menghadapi pandemi Covid-19 agar dampak sosial ekonominya tidak berkepanjangan bagi masyarakat. Pemerintah dapat mendorong dengan optimal aspek s*ocial linking* yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya pemerintah dengan suka rela bersedia bekerjasama dengan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang terukur dan menghasilkan manfaat yang dinikmati bersama.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

(Pearce & Robbins, 2008) menjelaskan bahwa strategi adalah rencana berskala besar, berorientasi ke masa depan, guna berinteraksi dan bersaing untuk mencapai tujuan. Sementara (Hadiyanti, 2008) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang disepakati. Adapun (Mardikanto, T., Lestari, E., Anantanyu, S., & Saddhono, 2010) menjelaskan tentang tiga arah strategi pemberdayaan yakni: (1) Keberpihakan; (2) Penguatan otonomi dan pendelegasian wewenang; (3) Modernisasi. Keberpihakan dimaksudkan sebagai sikap berpihak pemerintah atau para *elite* terhadap kepentingan-kepentingan yang tengah diperjuangkan masyarakat akibat dari ketidak berimbangan, status dan akses yang dialami oleh masyarakat. Di era pandemi ini, keberpihakan merupakan langkah awal dan mendasar dalam mempercepat pemulihan kondisi ekonomi sosial masyarakat. Keberpihakan atas persoalan yang dialami buruh migran, keberpihakan pada pelaku usaha dan keberpihakan atas keterbatasan ekonomi masyarakat. Implementasi dari keberpihakan adalah perjuangan-perjuangan untuk memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Implikasinya adalah terciptanya satu iklim kondusif dimana masyarakat dapat mengatasi berbagai persoalan yang diakibatkan oleh pandemi.

Penguatan otonomi dan pendelegasian wewenang merupakan lanjutan dari sikap keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Otonomi dan pendelegasian wewenang memposisikan dan menjadikan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan secara lebih mandiri. Harapannya masyarakat dapat dengan leluasa merumuskan program dan atau kegiatan yang mampu mengatasi persoalan serta dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang berkuasa penuh atas program yang diinisiasinya. Sedangkan perubahan struktur sosial terkait dengan pembentukkan skema struktur sosial yang paling memungkinkan memberikan hak dan akses yang sama terhadap berbagai sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat. Akses penuh terhadap program dan kebijakan pemerintah, akses terhadap lahan usaha, akses terhadap permodalan dan pemasaran produk serta akses terhadap dukungan organisasi publik. Sinergitas arah pemberdayaan masyarakat jika diskemakan dan diimplementasikan dengan optimal, maka persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dapat diubah menjadi berbagai peluang, berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Merujuk tiga arah pemberdayaan masyarakat yang dapat diinisiasi dan dilakukan oleh pemerintah, maka pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan beberapa tahap yakni tahap seleksi, tahap sosialisasi dan tahap pemberdayaan. Pertama tahap seleksi. Seleksi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria dan karakteristik masing-masing dari masyarakat terdampak. Karakteristik wilayah pemukiman padat penduduk berbeda dengan karakteristik wilayah pemukiman perkotaan. Begitu pula perlu diperhatikan karakteristik dari individu terdampak misalnya buruh harian, pedagang, karyawan ter-PHK, penyedia jasa usaha mikro dan pengusaha.

Mengidentifikasi wilayah, karakteristik individu terdampak adalah langkah awal dalam memperoleh informasi terkait apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan masyarakat. (Suryanti et al., 2020) melakukan pemberdayaan pertanian organik dengan model hidroganik budikdamer di wilayah Bantul Yogyakarta. (Luthfia, 2020) memilih melakukan

pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Berbeda dengan segmentasi pemberdayaan pada jamaah masjid yang dilakukan oleh (Alwi, M.A., 2020) yang menekankan pada pola-pola penyaluran zakat kepada masyarakat dhuafa. (Steelyana, 2013) melakukan rekayasa sosial dengan membuat strategi pemberdayaan bagi perempuan berpendapatan rendah melalui ekonomi inklusif. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran bahwa penentuan wilayah dan mengidentifikasi karakteristik masyarakat adalah hal yang penting agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai.

Tahap kedua sosialisasi pemberdayaan. Sosialisasi merupakan kegiatan esensisal dalam menciptakan keberdayaan masyarakat. Sosialisasi terkait dengan bagaimana informasi dan program pembangunan dikomunikasikan dan didialogkan dengan masyarakat. Melalui komunikasi dan dialog intensif, tujuan pemberdayaan bahkan dapat dicapai lebih cepat. Implikasi dari sosialisasi adalah peningkatan pengetahuan masyarakat baik terkait inovasi, kebijakan program sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Beberapa bentuk sosialisasi terkait pandemi Covid-19 dilakukan melalui media. Media dalam praktik pemberdayaan menjalankan fungsinya untuk mengkomunikasikan informasi-informasi kepada masyarakat. (Uchjana Onong, 2017) menyebutkan empat fungsi media massa diantaranya untuk memberikan informasi (*to inform*), untuk mendidik (*to educate*), untuk menghibur (*to entertain*) dan untuk mempengaruhi masyarakat (*to influence*). Dengan fungsi-fungsi ini media memiliki kekuatan tersendiri dan besar dalam meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku masyarakat. Dengan demikian media memiliki peran kunci dalam keberhasilan proses pemberdayaan melalui sosialisasi dan informasi yang disampaikan.

Tahap ketiga adalah proses pelaksanaan pemberdayaan. Tahap ketiga dalam pemberdayaan memastikan bahwa proses pemberdayaan berlangsung dengan melibatkan masyarakat. Dalam tahap ini terkait dengan langkah-langkah nyata dan taktis (*in put*), pembukaan akses terhadap berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat semakin berdaya. Lebih jauh pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan mengandung arti melindungi. Artinya pemberdayaan berusaha mencegah kelompok yang lemah menjadi semakin lemah ketika berhadapan dengan kelompok dengan kekuatan dominan. Oleh sebab itu, keberpihakan terhadap kelompok lemah adalah hal mendasar sifatnya. Dalam proses pemberdayaan melindungi harus dimaknai sebagai upaya melindungi kelompok lemah dari persaingan yang tidak seimbang serta mencegah terjadinya eksploitasi. Karenanya meletakkan pemahaman bahwa masyarakat memiliki potensi besar dan kuat untuk dikembangkan haruslah terlebih dahulu ada sebelum pemberdayaan itu dimulai.

Telah banyak program pemberdayaan yang dilakukan selama pandemi Covid-19, baik pemberdayaan yang sifatnya penguatan kapasitas masyarakat maupun pemberdayaan terkait perubahan perilaku dan sikap masyarakat dalam merespon persoalan pembangunan. Beberapa kasus pemberdayaan misalnya, pemberdayaan terhadap pemuda terkena PHK dengan memberikan keterampilan-keterampilan baru atau membuka usaha mikro dengan sesama ter-PHK. Pemberdayaan terhadap ibu-ibu terdampak pandemi Covid-19 dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang strategi ketahanan pangan keluarga dan atau perluasan akses dan modal usaha mikro. (Kurniawati et al., 2020) melakukan sosialisasi penerapan pola hidup sehat untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 secara langsung dengan masyarakat. Menyediakan tempat cuci tangan dan melakukan penyemprotan adalah salah satu hasil dari program pemberdayaan yang dihasilkan. Adi (2020) melakukan sosialisasi keharusan masyarakat untuk menyesuaikan dan merubah perilaku di masa pandemi Covid-19.

Problematika yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik yang sulit terprediksi. Pengangguran, keterpurukan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat yang rendah kerap menjadi isu yang tidak terbendung. Pandemi Covid-19 menjadikan keadaan sosial ekonomi masyarakat makin terasa ekstrim. Masyarakat dengan pendidikan tinggi dengan masyarakat yang lemah dalam persoalan pendidikan akan diperhadap-hadapkan. Kurangnya masyarakat terhadap akses informasi, akses modal memberikan dampak pada lemahnya mental masyarakat ketika beradaptasi di era pandemi ini.

Di tengah hiruk pikuknya problematika pandemi Covid-19, pemberdayaan perlu juga didasarkan pada budaya, nilai-nilai dan kekuatan lokal yang dapat dijadikan energi dalam membentuk keberdayaan masyarakat. Produk akhir dari proses pemberdayaan dan penguatan modal sosial masyarakat adalah bergesernya fungsi individu masyarakat. Peran dan fungsi masyarakat yang awalnya menjadi objek pembangunan kemudian berganti menjadi subjek pembangunan. Relasi sosial yang berkembang dalam pemberdayaan hanya akan bercirikan relasi antar subjek dengan subjek, bukan relasi antar subjek dengan objek. Dengan relasi ini maka yang terjadi adalah kesamaan hak, kesamarataan kewajiban dan kesinambungan peran. Maka dari itu, sasaran utama pemberdayaan masyarakat di era pandemi ini adalah bukan hanya masyarakat yang lemah yang tidak memiliki daya dan kemampuan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 tetapi juga masyarakat yang kuat secara ekonomi sosial. Tujuannya adalah agar terbentuk sinergi dan saling mendukung antar seluruh masyarakat dan *stakeholders.* Hasil akhir dari produk pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat.

KESIMPULAN

Strategi pemberdayaan di era pandemi Covid-19 di Indonesia meliputi tiga arah kebijakan pembangunan: (1) Keberpihakan; (2) Penguatan otonomi dan pendelegasian wewenang guna mendorong peran serta masyarakat; (3) Modernisasi pembangunan Adapun tahapan-tahapan dalam strategi pemberdayaan yang harus dilakukan adalah seleksi lokasi, sosialisasi dan pemberdayaan. Relasi sosial dari strategi pemberdayaan yang dikembangkan adalah relasi antar subjek dengan subjek bukan relasi antar subjek dengan objek. Bentuk pemberdayaan yang tepat di era pandemi Covid-19 adalah *Community Based Empowerment* yang memposisikan masyarakat sebagai titik sentral dan bagian integral dalam proses pembangunan. Sedangkan modal sosial dapat dirancang dalam penguatan modal sosial masyarakat di era pandemi Covid-19 yakni: (1) *Social bounding;* (2) *Social bridging;* (3) *Social linking*. Konstruksi strategi pemberdayaan masyarakat terletak pada diposisikannya kearifan lokal, potensi-potensi lokal, karakteristik individu dan karakeristik wilayah sebagai energi dalam proses pemberdayaan.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini terbagi tiga. Pertama bagi pemerintah, perlu adanya konsep pemberdayaan yang dapat diakses oleh keseluruhan masyarakat terdampak pandemi, dan perlu dirancang konsep penguatan modal sosial masyarakat yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan kearifan lokal sehingga masyarakat dapat menyelesaikan persoalan-persoalan secara mandiri dan sukarela. Bagi masyarakat, diperlukan kreatifitas, inovasi dan stamina kuat dalam merespon perubahan siklus produktifitas ekonomi dengan terus membangun jaringan, akses dan peluang yang berdampak bagi pengembangan usaha. Bagi peneliti, diperlukan konsep-konsep pemberdayaan baru yang sesuai dengan era pandemi Covid-19 yang bersifat universal, inklusif dan mudah diterapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdullillah rasa syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya artikel ini. Terimaksih kepada Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Untirta yang telah banyak memberikan kontribusi dalam pemetaan persoalan pemberdayaan dan modal sosial masyarakat di era pandemi Covid-19. Kepada para peneliti yang tergabung dalam Plasma Institute, terimakasih atas diskusi dan pecerahan yang diberikan selama proses penelitian sampai penyusunan artikel ini rampung.

REFERENCES

1. Adi, K. (2020). Sosialisasi Perubahan Perilaku Masyarakat Pada Era Pandemi Covid-19 di Desa Jatisari. Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, 3(1), 43-59.
2. Alwi, M.A., M. M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Al-Hikmah, 18(1), 99–116. https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.25.
3. Amalia, A. D. (2015). Modal sosial dan kemiskinan. 1(200), 310–323.
4. Arumsari, N., Eka Septina, W., Luthfi, M., & Kholis Ali Rizki, N. (2017). Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. In Kampus Sekaran, Kel. Sekaran, Kec. Gunung Pati (Vol. 50229).
5. Bourdieu, P. (1987). The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. The Hastings Law Journal, 38(1971), 805–853.
6. Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2016). Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo. Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM), 1(1), 131–144.
7. Cox, E. (1995). The 1995 Boyer Lectures A Truly Civil Society Broadening The Views.
8. Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 6(1), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463.
9. Fiscal Monitor, April 2020 Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic. (2020). International Monetary Fund.
10. Fukuyama, F., & Khan, M. S. (2012). MF Working Paper Social Capital and Civil Society International Monetary Fund Authorized for distribution. IMF Institute Conference on Second Generation Reforms, 1(1), 0–18.
11. Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunn. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987, 1–14.
12. Hadi, S. (2016). Profil Modal Sosial Dan Tingkat Partisipasi Peternakpada Pengembangan Sapi Potong Di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 107. https://doi.org/10.21070/kanal.v2i2.293.
13. Hadiyanti, P. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbm Rawasari, Jakarta Timur. Perspektif Ilmu Pendidikan, 17(IX), 90–99. https://doi.org/10.21009/pip.171.10.
14. Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Pandemi dan Pertumbuhan Ekonmi Negara-Negara Terdampak. Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, 995–1115.
15. Junaedi, D., & Salistia, F. (2020a). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 109–131. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.112.

16. Junaedi, D., & Salistia, F. (2020b). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In Simposium Nasional Keuangan Negara (pp. 995–1115).
17. Kurniawati, K. R. A., Santosa, F. H., & Bahri, S. (2020). Sosialisasi Hidup Sehat di Tengah Wabah Virus Corona. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter, 3(1), 58–65.
18. Luthfia, A. R. (2020). Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2).
19. Mardikanto, T., Lestari, E., Anantanyu, S., & Saddhono, K. (2010). Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat.
20. Mudiarta, K. G. (2017). Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 27(1), 1. https://doi.org/10.21082/fae.v27n1.2009.1-12.
21. Muhyiddin, O. (2020). Edisi Khusus tentang Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2). https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.120.
22. Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita, 5(2), 212. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313.
23. Pearce, J. A., & Robbins, D. K. (2008). Strategic transformation as the essential last step in the process of business turnaround. Business Horizons, 51(2), 121–130. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2007.11.003.
24. Purba, R. (2020). Kepanikan Sosial Akibat Munculnya COVID-19 Ririn Purba Kepanikan Sosial Akibat Munculnya Covid-19 Social Panic Due to the Emergence of Covid-19. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 19(2), 124–136.
25. Rizki Rahmawati, E. (2017). Analisis Modal Sosial Pada Pelaksanaan Pendidikan Di Sman Model Terpadu Bojonegoro. Paradigma, 5(3), 1–10.
26. Servaes, H., & Tamayo, A. (2017). The role of social capital in corporations: A review. Oxford Review of Economic Policy, 33(2), 201–220. https://doi.org/10.1093/oxrep/grx026.
27. Shaleh, M. Y. (2020). Peran Modal Sosial dan Peran Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat.
28. Sikki, K. L. (2020). Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19. Journal of Islamic Civilization, 2(1), 8–16. https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1517.
29. Steelyana, E. (2013). Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia. The Winners, 14(2), 95. https://doi.org/10.21512/tw.v14i2.649.
30. Suryanti, S., Umami, A., Firmansyah, R., & Widyasaputra, R. (2020). Dengan Model Hidroganik Budikdamber Di Era Pandemi Covid – 19. Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM), 1(2), 1–6.
31. Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. In Jurnal Masyarakat dan Budaya (Vol. 5, Issue 1).
32. Uchjana Onong, E. (2017). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik (28th ed.). Risdakarya.
33. Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis. 87–102.
34. Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12.

35. Wirutomo, P. (2011). Social Development Policies on Informal Sector in Solo. International Journal of Administrative Science & Organization, 18, Number(Bisnis & Birokrasi), 94–107.
36. Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 1–35.
37. Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, 36(March), 101528. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528